

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Badan Usaha Milik Desa “Bersama Jaya” sudah berjalan semestinya jika dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Desa tahun 2021-2022 namun belum efektif jika dilihat dari anggaran yang dialokasikan kepada BUMDes dengan koptribusi sosial yang seharusnya dilakukan , yaitu menjalankan usaha jual-beli obat-obatan pertanian yang berupa pupuk dan pestisida. Meskipun mengalami penurunan pada masa awal BUMDes “Bersama Jaya” dijalankan yang diakibatkan oleh tidak efektifnya jenis usaha yang dijalankan.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa Katua “Bersama Jaya” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pertama, faktor anggaran yang dimana anggaran merupakan suatu instrument yang sangat penting bagi BUMDes dalam menjalankan usahanya. Kedua, faktor keterbatasan sumber daya manusia pengelola dimana dalam pengelolaannya kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting. Ketiga, terbatasnya dukungan dari pihak ketiga (swasta) dimana keterlibatan pihak ketiga (swasta) dalam pengembangan usaha BUMDes akan dapat menumbuh kembangkan usaha secara berkelanjutan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai efektivitas peran BUMDes “Bersama Jaya” dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Katua, BUMDes “Bersama Jaya” diharapkan agar meningkatkan pengelolaan dan pelayanannya yaitu meningkatkan hubungan kerjasama dengan pengelola, masyarakat ataupun pihak ketiga. Dan Bagi Dinas Pemerintah Desa Katua hendaknya senantiasa memberikan dukungan kepada BUMDes “Bersama Jaya” untuk mengelolah program lainnya selain jual-beli obat-obatan pertanian. sehingga membantu pengurus BUMDes “Bersama Jaya” mengelola potensi lain yang ada diwilayah Desa Katua.
2. Tidak adanya diskriminasi dalam penyaluran dana melalui BUMDes serta dalam melakukan perekrutan pengurus dan pengelola BUMDes “Bersama Jaya” Desa Katua. BUMDes “Bersama Jaya” juga dapat melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap SDM yang ada dalam BUMDes “Bersama Jaya” Desa Katua.
3. BUMDes “Bersama Jaya” Desa Katua perlu melaksanakan *establish cooperation* atau kerjasama dengan pihak swasta dengan tujuan agar mampu membantu BUMDes dalam pelaksanaan kegiatan ataupun sumber finansial terhadap BUMDes.
4. Pemerintah Desa diharapkan dapat segera melakukan pendaftaran agar Bumdes “Bersama Jaya” berbadan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arikunto, Suharsimi. (1990). *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal dan Suhartana Pria Wira. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Eko, Sutoro, dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- HS, Salim. (2003). *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonn y. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irawan. (1997). *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Karim, Abdul. (2019). *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* Makassar: Nas Media Pustaka.
- Mukmin, Hasan. (2014). *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Najib, Mohammad, dkk. (2019). *BUMDES: Pembentukan Dan Pengelolaannya*. Jakarta: Pusdatin Balilaf.
- Nata, Abuddin. (2014). *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Purwosutjipto, HMN. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentukPerusahaan, Cetakan Kesebela*. Jakarta: Djambatan.
- Sembiring, Sentosa. (2012). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (Edisi Revisi)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- _____. (2015). *Hukum Dagang Cetakan Ke-4*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Silondae, Akbar Arus, dan Ilyas B Wirawan. (2012). *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. (1993). *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco.

Suleman, Rahman Abdul, dkk. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta: UAI Press.

Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulungagung: Akademia Pustaka

Syahza, Almasdi. (2021). *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*. Pekanbaru: UR Press.

Torang, Syamsir. (2014). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

B. JURNAL

Agunggunanto, Yusuf Edy, dkk. (2016). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. 13 (1).
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395/753>

Alfiansyah. (2021). *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5(2).
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1991/1621>

Ridlwan, Zulkarnain. (2013). *Payung Hukum Pembentukan BUMDES*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 7 (3).
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396356>

Sinuhaji, Yoyada Boy Zimri, Budiono, Rachmad Abdul, Effendi, Lutfi. (2017).. *Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Prdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris*, (Tesis, Malang, UB).
<https://media.neiliti.com/media/publications/35695-ID-persekutuan-perdata-menurut-undang-undang-nomor-2-tahun-2014-tentang-perubahan-a.pdf>

C. UNDANG-UNDANG

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan*. Dicabut dengan. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Diubah dengan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Diubah dengan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mencabut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*. Mencabut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Mengubah sebagian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Mencabut. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Mengubah. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ihwan S.Kep, tanggal 16 Oktober 2022 di Kediaman Bapak Ihwan S.Kep.



Wawancara dengan Megawati., S.E, tanggal 18 Oktober 2022 di Desa Katua.



Wawancara dengan Iswadin, tanggal 18 Oktober 2022 di Kantor Desa Katua.



Wawancara dengan Lukman S.E, tanggal 17 Oktober 2022 di Kediaman Bapak Lukman S.E.



Wawancara dengan Syahrudin S.H, tanggal 19 Oktober 2022 di Kantor Desa Katua.



Foto Bersama dengan Anggota BUMDes "Bersama Jaya" tanggal 19 Oktober 2022 di Kantor Desa Katua.



Produk Usaha BUMDes “Bersama Jaya” di Desa Katua.



Produk Usaha BUMDes “Bersama Jaya” di Desa Katua.